

**MODEL PENANGANAN PERKARA *ILLEGAL LOGGING* DALAM  
PERSPEKTIF KEADILAN DISTRIBUTIF  
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Ngawi)**

**TESIS**

**Diajukan Kepada  
Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Magister Dalam Ilmu Hukum**



**Oleh :**

**NOVI WIJAYANTI  
NIM. R 100090021**

**MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2016**

## NOTA PEMBIMBING

Prof.Dr. Khudzaifah Dimyati, SH, M.Hum  
Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Program Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Nota Dinas

Hal : Tesis Saudara Novi Wijayanti

Kepada Yth.

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap tesis saudara :

Nama	:	Novi Wijayanti
NIM	:	R 100090021
Konsentrasi	:	Hukum Pidana
Judul	:	Model Penanganan Tindak Pidana Illegal Logging Dalam Perspektif Keadilan Distributif (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Ngawi)

Dengan ini kami menilai tesis tersebut dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian tesis pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Surakarta, April 2014

Pembimbing,



Prof.Dr.Khudzaifah Dimyati, SH, M.Hum

## NOTA PEMBIMBING

Kelik Wardiono, SH, M.Hum

Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Program Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Nota Dinas

Hal : Tesis Saudara Novi Wijayanti

Kepada Yth.

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap tesis saudara :

Nama : Novi Wijayanti  
NIM : R 100090021  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Judul : Model Penanganan Tindak Pidana Illegal Logging  
Dalam Perspektif Keadilan Distributif  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Ngawi)

Dengan ini kami menilai tesis tersebut dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian tesis pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Surakarta, April 2014

Pembimbing pendamping I,



Kelik Wardiono, SH, M.Hum

**TESIS BERJUDUL**  
**MODEL PENANGANAN PERKARA *ILLEGAL LOGGING***  
**DALAM PERSPEKTIF KEADILAN DISTRIBUTIF**  
**(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Ngawi)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

**NOVI WIJAYANTI**

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada tanggal 30 Nopember 2016  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

Pembimbing I

  
**Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum**


Pembimbing II

  
**Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.Hum**

Penguji

  
**Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum**

Surakarta, 18 Februari 2017  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Sekolah Pascasarjana  
Direktur,

  
**Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Novi Wijayanti

NIM : R 100090021

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Judul : Model Penanganan Perkara *Illegal Logging* Dalam  
Perspektif Keadilan Distributif (Studi Kasus Di Pengadilan  
Negeri Ngawi)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang telah saya jelaskan. Apabila di kemudian hari terbukti tesis ini jiplakan, gelar yang diberikan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta batal saya terima.

Surakarta, September 2016

Yang membuat pernyataan



Novi Wijayanti



## Abstrak

Novi Wijayanti. R10090021. Model Penanganan Perkara Illegal Logging Dalam Perspektif Keadilan Distributif (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Ngawi. Sekolah Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016. Modus operandi (praktek atau cara-cara) dari kegiatan penebangan secara tidak sah (*illegal logging*) maka tindak pidana tersebut dapat dikategorikan telah menjadi rangkaian atau gabungan dari beberapa tindak pidana, atau tindak pidana berlapis.

Hasil penelitian dan pembahasan bahwa Pelaksanaan penanganan perkara illegal logging di Pengadilan Negeri Ngawi, Putusan Nomor: 342/Pid.Sus/201 1/PN.Ngw telah mengakomodasi aspek: (a) Bagian yang memenuhi kriteria bagian yang diterima seseorang harus sebanding dengan sumbangan yang diberikan dan kesebandingan bagian yang diterima seseorang juga harus dilihat dengan bagian yang diterima orang lain; (b) Memenuhi dengan mengutamakan kebutuhan sebagai pertimbangan untuk distribusi; (c) Tujuan kesejahteraan bersama; (d) Ada 2 pihak yaitu pembagi dan penerima; (e) Pembagi kedudukan lebih tinggi dibanding penerima; (f) Digunakan untuk melihat kebijakan pemerintah terhadap rakyat; (g) Ketidaksamaan sosial dan ekonomi. Dari konsep keadilan distributif menurut Aristoteles, yaitu keadilan yang diterima seseorang berdasarkan jasa atau kemampuan yang telah disumbangkannya. Putusan Nomor: 163/Pid.Sus/2012/PN.Ngw. telah mengakomodasi aspek: (a) Bagian yang memenuhi kriteria bagian yang diterima seseorang harus sebanding dengan sumbangan yang diberikan dan kesebandingan bagian yang diterima seseorang juga harus dilihat dengan bagian yang diterima orang lain; (b) Kesetaraan; (c) Memenuhi mengutamakan kebutuhan sebagai pertimbangan untuk distribusi; (d) Tujuan kesejahteraan bersama; (e) Ada 2 pihak yaitu pembagi dan penerima; (f) Pembagi kedudukan lebih tinggi dibanding penerima; (g) Digunakan untuk melihat kebijakan pemerintah terhadap rakyat; (h) Ketidaksamaan social dan ekonomi.

Konsep keadilan distributif menurut John Rawls, bahwa prosedur untuk menentukan hasil yang adil harus benar-benar dijalankan. Sebab dalam hal ini tidak ada kriteria independen yang bisa dijadikan acuan agar hasil nyata bisa adil dan membuat efek jera kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, begitu juga kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat. Disamping itu untuk memenuhi perasaan keadilan hendaknya perumusan sanksi pidana Tindak Pidana Di Bidang Kehutanan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau aparat pemerintah terutama kepada pejabat yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkan intensitas kejahatan Kehutanan diatur dan dirumuskan secara khusus yang tentu saja perumusan sanksi pidananya tidak sama dengan sanksi pidana yang dilakukan terhadap orang/pribadi.

**Kata Kunci:** Model, Illegal Logging, Keadilan Distributif.

## **Abstract**

Novi Wijayanti. R100090021. The Case Management Model of Illegal Logging in Distributive Justice Perspective (A Case Study on Ngawi District Court). The Graduate Program in Law Science, Muhammadiyah University of Surakarta, 2016

The practice or way of illegal logging makes this crime is categorized into a series of crimes or multilayered crime.

The result of research and discussion showed that the implementation of illegal logging case management in Ngawi District Court, verdict 342/Pid.Sus/2011/PN.Ngw had accommodated the following aspects: (a) The share complying with the criterion of share an individual receives should be comparable to the contribution given and comparability of the share an individual receives should also take into account the share another receives; (b) The compliance emphasizes on the requirement as the distribution rationale; (c) The mutual wellbeing objective, (d) Here were 2 parties: divider and receiver, (d) Divider is superior to receiver; (f) Used to see the government policy to the people; (g) Social and economic inequality. From the distributive justice concept according to Aristoteles. The justice an individual receives according to the service or the ability contributed. The Verdict 163/Pid.Sus/2012/PN.Ngw had accommodated the aspects: (a) The share complying with the criterion of share an individual receives should be comparable to the contribution given and comparability of the share an individual receives should also take into account the share another receives; (b) The compliance emphasizes on the requirement as the distribution rationale; (c) The mutual wellbeing objective; (d) There were 2 parties: divider and receiver; (e) Divider is superior to receiver; (f) Used to see the government policy to the people; (g) Social and economic inequality.

From John Rawl's distributive justice concept, it could be seen that the procedure to determine the just outcome should be taken actually. It is because, in this case, there is no independent criterion to be the reference for the just outcome and to prevent the perpetrator from repeating the forestry crime, and to prevent others with forestry activity from doing the similar crime with heavy punishment. In addition, to comply with the feeling of justice, the formulation of condemnation to the crime in Forestry sector committed by civil servant or government apparatus particularly the official with authority in forestry sector potentially improving the intensity forestry crime should be governed and formulated particularly differently from that committed by an individual/private.

**Keywords:** Models, Illegal Logging, Distributive Justice

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan seluruh alam atas segala karunia dan ridho-Nya, sehingga tesis dengan judul “Model Penanganan Perkara *Illegal Logging* Dalam Perspektif Keadilan Distributif (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Ngawi)” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Setiaji, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberikan izin sehingga tugas penelitian ini dapat terwujud.
2. Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, SH, M.Hum, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, sekaligus Pembimbing I yang telah memfasilitasi dalam penelitian Tesis ini.
3. Wardah Yuspin, SH, M.Kn, Ph.D, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan bimbingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penyusunan penelitian ini secara mendalam.
4. Dr. Kelik Wardiono, SH, M.Hum, selaku pembimbing II dan dewan penguji yang telah memberikan bimbingan, saran, masukan dan kritik membangun dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penyusunan penelitian ini.
5. Dr. Natangsa Surbakti, SH, M.Hum, sebagai penguji yang telah memberikan arahan dan masukan.
6. Semua dosen Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan banyak ilmu pada penulis.



7. Seluruh staf dan karyawan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah banyak membantu penulis.
8. Rekan-rekan mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang selalu memberikan bantuan dan dukungan.
9. Keluargaku tercinta: suami dan anak-anak, yang tanpa lelah memberi semangat, dorongan, pengertian, dan doa kepada penulis.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu per satu yang banyak memberikan bantuan selama penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna. Semoga apa yang penulis sampaikan dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, Yakin Usaha Sampai.

Surakarta, September 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING I .....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING II .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
 <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	 <b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	6
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat .....	6
D. Metode Penelitian .....	7
E. Kerangka Penelitian .....	11
F. Orisinalitas .....	11
 <b>BAB II KERANGKA TEORI .....</b>	 <b>13</b>
A. Tinjauan Umum Mengenai Hutan .....	13
B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Dibidang Kehutanan .....	25
C. Pengertian Tindak Pidana Dan Illegal Logging .....	35
D. Pengertian Teori Keadilan .....	41
E. Kebijakan Hakim dalam Memutuskan Suatu Perkara	
Guna Terwujudnya Rasa Keadilan .....	48
 <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	 <b>54</b>
A. Hasil Penelitian .....	54
1. Pengakomodasian Keadilan Distributif dalam Perkara	
Illegal Logging di Pengadilan Negeri Ngawi .....	54
2. Model Penanganan Perkara Illegal Logging	

dalam Perspektif Keadilan Distributif .....	73
B. Pembahasan .....	80
1. Pengakomodasian Keadilan Distributif dalam Perkara	
Illegal Logging di Pengadilan Negeri Ngawi .....	80
2. Model Ideal Penanganan Perkara Illegal Logging	
dalam Perspektif Keadilan Distributif .....	96
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
A. Simpulan .....	100
B. Saran .....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>103</b>
<b>LAMPIRAN</b>	